



# Buletin Parlementaria

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021



## Pembukaan PON XX Sangat Papua, Sangat Indonesia



9 772614 339005



BULETIN



**3** Pimpinan DPR  
Berharap Panglima  
TNI Terpilih Sebelum  
9 November



**5** Gus Muhaimin:  
TNI Garda  
Terdepan Jaga  
Kedaulatan NKRI

# Pembukaan PON XX Sangat Papua, Sangat Indonesia!



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama para menteri mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan venue PON XX Papua di Gedung Istora Bangkit, Jayapura, Papua. Foto: Eno/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memuji pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang digelar secara meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya, dan dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Dia menyebut PON kali ini menjadi peristiwa sejarah karena pelaksanaannya dilakukan di masa pandemi Covid-19.

“Satu kata untuk pembukaan PON XX, hebat! Sangat Papua, sangat Indonesia. *Torang* bisa buat acara besar nasional yang rapih dan bagus meskipun di tengah pandemi,” ujar Puan dalam pembukaan PON XX di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten

Jayapura, Papua, Sabtu (2/10).

PON XX Papua dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Selain Jokowi dan Puan, pembukaan PON juga dihadiri jajaran pejabat negara seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menpora Zainudin Amali, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Puan yang hadir memakai kaos PON XX Papua menyebut pesta olahraga kali ini sebagai sebuah momentum bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena PON Papua merupakan perhelatan skala nasional pertama sejak Indonesia memasuki masa Pandemi Covid-19.

“PON XX di Papua menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menang melawan Pandemi Covid-19, asalkan kita disiplin, bertekad keras, dan bergotong royong,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

PON kali ini diikuti oleh 7.046 atlet dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga. Pelaksanaan PON diselenggarakan pada 4 klaster wilayah di Bumi Cenderawasih yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

Puan mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan PON merupakan hasil kerja sama apik dari berbagai pihak. Menurutnya, masyarakat Papua juga berperan besar atas suksesnya PON XX. “PON XX di Papua adalah perayaannya bangsa Indonesia yang melibatkan gotong royong begitu banyak Kementerian/Lembaga dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atlet, pelatih, tenaga medis, dan berbagai elemen bangsa,” ungkap Puan.

Untuk menunjang PON XX Papua berjalan dengan lancar di masa pandemi Corona, penyelenggara terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai Satgas Penanganan Covid-19. Selain itu, ada ribuan personel TNI/Polri yang ikut terlibat untuk mengamankan pesta olahraga nasional tersebut.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK itu yakin, PON XX Papua akan memperkokoh semangat kebersamaan. Ia juga memberikan dukungan bagi seluruh atlet agar bisa bertanding dengan baik untuk mengharumkan nama daerahnya masing-masing.

“PON mempersatukan Indonesia karena antar-daerah berkompetisi dengan semangat menjaga NKRI. Dengan semangat sportivitas, maka persaingan olahraga justru dapat menguatkan rasa kekeluargaan dan persatuan,” tutup Cucu Proklamator Bung Karno tersebut. ■ sf



# Pimpinan DPR Berharap Panglima TNI Terpilih Sebelum 9 November



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus. Foto: Jaka/mvl

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk

Freidrich Paulus berharap DPR RI sudah bisa menetapkan Panglima TNI yang baru, sebelum Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memasuki pensiun atau sebelum 9 November 2021. Meski DPR RI akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021 ini, Lodewijk menekankan dari aspek waktu, masih memungkinkan bagi DPR RI untuk melakukan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI.

“Kalau dari aspek waktu ya, Pak Hadi Tjahjanto pensiun tanggal 9 November, secara *de facto* beliau pensiun tanggal 9 November, artinya ditarik ke sini dengan masa reses kita, pasti ada waktu. Tapi kita berharap sebelum tanggal 9 November kita sudah punya panglima

TNI yang baru, Insya Allah seperti itu,” ungkap Lodewijk saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).

Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan bahwa DPR RI masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan serangkaian proses pemilihan pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto seperti *fit and proper test* hingga pelantikan. “Ada waktu kita (DPR RI) untuk membahas masalah itu, *fit and proper test* sampai dengan pelantikan, saya kira waktunya kita ada,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, usia pensiun paling tinggi bagi perwira adalah 58 tahun. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sendiri akan memasuki usia ke 58 tahun pada 8 November 2021 mendatang. ■ *bia/sf*



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiaryah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**

Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Anief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afrdhillah, Gerald Ople, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**

**DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Rachmat Gobel Tegaskan Komitmen Penuh DPR terhadap SDGs Parlemen Global

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan DPR berkomitmen penuh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui fungsi-fungsinya. Gobel juga mengajak semua pihak dalam hal ini parlemen dunia untuk memperkuat kerjasama di tingkat nasional dan global. Melalui forum *First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs*, Gobel berharap parlemen dapat terus meneguhkan kembali komitmen yang telah disepakati bersama dalam *2030 Agenda for Sustainable Development*.

Secara khusus, sambung Gobel, melalui fungsi parlemen, DPR RI dapat terus mendorong pengarusutamaan SDGs ke dalam berbagai proses legislasi di tingkat nasional dan memperkuat kerjasama yang telah terbangun di tingkat global untuk bersama-sama mewujudkan target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pimpinan Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antar negara sebagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Sehingga, diperlukan kerja sama dan rasa tolong-menolong dan bukan kompetisi dalam pembangunan global dan penanganan pandemi. Pandemi Covid-19 juga semakin menyadarkan bahwa kita sebagai manusia untuk mempererat kerja sama dan saling tolong menolong,” ujar Gobel saat menutup *The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs* yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel saat menghadiri The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs. Foto: Puntho/rvi

Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Kamis (30/9) yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) secara fisik dan virtual.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut juga mengungkapkan, pandemi Covid-19 semakin menyadarkan masyarakat dunia bahwa keseimbangan ekologis harus semakin dijaga. “Munculnya virus Covid-19 ini



**PENTINGNYA KERJA  
SAMA ANTAR NEGARA  
SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PANDEMI  
COVID-19**

merupakan bentuk evolusi makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Akses terhadap vaksin dan obat-obatan perlu ada kesetaraan. Ilmu kedokteran, farmasi, dan mikrobiologi harus dibagikan bersama. Jangan dimonopoli oleh negara-negara tertentu saja,” pungkas Gobel.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong yang hadir secara virtual mengungkapkan bahwa pencapaian SDGs mengalami peningkatan. Karena itu, Martin mengimbau parlemen dunia harus lebih pro-aktif dalam berbagai upaya pencapaian SDGs termasuk dari sisi akuntabilitas. Selain itu, perlu upaya ekstra untuk mengurangi ketimpangan pendanaan, akses terhadap data, dan ketimpangan *gender*. ■ pun/sf



# Gus Muhaimin: TNI Garda Terdepan Jaga Kedaulatan NKRI



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. Foto: Istimewa/nvi

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia mengatakan selama ini TNI merupakan garda terdepan dalam membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita harus bangga memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan selalu siap sedia menjaga keamanan dan ketentraman negara kita tercinta,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria**, Selasa (5/10). Ia mengatakan, selama

”

## KEDAULATAN NEGARA INI ADA DI TANGAN TNI SEBAGAI UJUNG TOMBAK TERDEPAN

ini kekuatan militer Indonesia cukup disegani di mata dunia.

Bahkan, mengacu pada data Global Fire Power (GFP), kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara. Indeks kekuatan TNI berada di level 0,2684, di bawah Jerman (0,2519) dan di atas Arab Saudi (0,3231). Bahkan lebih tinggi

daripada Australia, Israel, dan Spanyol. Indonesia bahkan menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara.

Politisi PKB ini mengatakan bahwa TNI akan selalu bersama rakyat. Begitu pula rakyat akan selalu kebersamaan TNI. Gus Muhaimin juga mengaku bangga karena selain diakui di mata dunia, berbagai survei kelembagaan juga selalu menempatkan TNI di urutan teratas lembaga yang dipercaya atau disegani masyarakat.

“Kita patut berbangga dengan kekuatan militer kita. Kedaulatan negara ini ada di tangan TNI sebagai ujung tombak terdepan,” urainya. Karena itu, tutur Gus Muhaimin, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mendukung kinerja TNI. DPR juga akan selalu mendukung peningkatan kinerja TNI. Salah satunya dengan mendukung dari sisi anggaran untuk melakukan peremajaan alutsista.

Diketahui, masih mengacu data GFP, kekuatan militer tersebut diukur berdasarkan jumlah sumber daya manusia, angkatan udara, darat, dan laut, serta sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. Tercatat Indonesia pada tahun ini memiliki 800.000 personel militer, yang terdiri dari 400.000 militer aktif dan sisanya cadangan.

Dari sisi sumber daya alam, kapasitas produksi minyak Tanah Air mencapai 800.000 barel per hari. Cadangannya mencapai 3,2 miliar barel. Lalu, segi alat utama sistem senjata TNI di kekuatan darat, negara ini memiliki 331 tank, 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 153 artileri swagerak, 366 artileri tarik, dan 63 peluncur roket.

Sedangkan dari matra laut, Indonesia pada 2021 memiliki 7 kapal fregat, 24 kapal korvet, lima kapal selam, 179 kapal patroli, 10 kapal penyapu ranjau. Sementara untuk pertahanan udara, terdiri dari pesawat tempur, pesawat serang darat, pesawat angkut, pesawat latihan, pesawatintai dan misi khusus, helikopter, dan helikopter tempur. ■ **ann/sf**

# Ego Sektoral, Penyebab Basis Data Kependudukan Belum Terintegrasi

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai ego sektoral di masing-masing kementerian/ lembaga (K/L) menjadi penyebab belum terintegrasinya basis data kependudukan di masyarakat. Menurut Doli, persoalan ini selalu menjadi masalah klasik di Indonesia karena belum punya sistem dan pengelolaan basis data yang terancang dengan baik.

“Setidaknya (data) belum terintegrasi. Jadi, masih ada ego sektoral *database* kependudukan kita. Misalnya, Kemensos punya Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) sendiri yang bicara tentang soal data kependudukan yang dilihat dari kemiskinan. Di Kementan punya

*database* sendiri yang berkaitan dengan klasifikasi pertanian seperti apa. BPS juga sama,” jelas Doli saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan Implementasi KTP

Elektronik (e-KTP) ke Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/10).

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menjadi *leading sector* yang melakukan proses pengintegrasian data kependudukan. Bukan karena mitra Komisi II DPR RI, namun, tegas Doli, Kemendagri memiliki basis data lengkap masyarakat mulai dari pencatatan kelahiran hingga kematian, serta memiliki aparat hingga tingkat bawah koordinasi secara vertikal.

“Itulah masalahnya karena tidak terintegrasi. Kalau ada bencana pasti kita ribut, karena ada penduduk yang merasa punya hak tapi tidak dapat bantuan, tapi ada yang merasa tidak berhak malah dapat bantuan.



Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Foto: Ridwan/nvi

## Luqman Hakim Apresiasi Disdukcapil Kota Bogor Atasi Peretasan Server

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim ini mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang mampu bergerak cepat menangani permasalahan peretasan server Disdukcapil sehingga pelayanan tetap berjalan

normal tanpa adanya gangguan. Ia juga menilai, Disdukcapil Bogor telah menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kita ke Bogor ini karena kinerja dari Disdukcapilnya juga bagus apalagi ditambah permasalahan *hacker* itu mereka tetap mampu menghadirkan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya gangguan,” Luqman saat

pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pemkot dan Disdukcapil Kota Bogor di Kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/10).

Politisi PKB ini mengatakan, data kependudukan merupakan informasi penting yang harus dirahasiakan. Ia menyangkan adanya dugaan peretasan atau pembobolan server tersebut dan meminta Disdukcapil Kota Bogor memperkuat sistem server dan pengamanan guna mengantisipasi kejadian serupa.

“Kita menyangkan kejadian pembobolan data Disdukcapil Kota Bogor oleh *hacker*. Untuk itu, kita dari Komisi II DPR RI melakukan

Itu ujung-ujungnya adalah *database* kependudukan. Sama dengan soal pemilu, yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap). Terus aja kalau mau Pemilu ribut masalah ini,” tambah Doli.

Untuk menyelesaikan persoalan data kependudukan yang berlarut-larut ini, Doli mengajukan dua usulan pembenahan sistem yang terintegrasi, valid, dan sistematis ini. **Pertama**, membangun badan khusus berada di bawah presiden langsung yang menangani basis data kependudukan. **“Kedua**, kalau tidak bangun badan khusus tersebut seharusnya (pengelolaan basis data kependudukan terpusat) ada di Kemendagri,” pesan legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Diketahui, sejak 2009, Kemendagri membuat e-KTP bagi setiap penduduk Indonesia untuk memiliki dokumen kependudukan tersebut. Selama ini, e-KTP telah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada, sensus penduduk, dasar perhitungan DAU-DAK-Dana Desa, verifikasi data bansos dan subsidi, hingga verifikasi dan validasi data dalam pelayanan publik. Sampai saat ini, tidak kurang dari 2.258 lembaga telah memanfaatkan data kependudukan sebagai instrumen untuk verifikasi kependudukan. ■ rdn/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pemkot dan Disdukcapil Kota Bogor. Foto: Taufan/nvl

kunjungan langsung ke sini untuk melihat bagaimana perkembangan penangannya,” ucap Luqman. ■ tn/es

## Awasi Program e-KTP, Komisi II Kunjungi Pemkab Tangerang



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Foto: Agung/nvl

**K**omisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) dan data kependudukan di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, dalam kunjungan kali ini pihaknya ingin mengetahui permasalahan dihadapi pemerintah daerah terkait e-KTP.

“Kami ingin tahu problem apa yang dihadapi. Sebab, KTP itu kan penting karena berkaitan dengan basis utama kepentingan masyarakat,” ujar Saan saat pertemuan di Kantor Bupati Tangerang, Banten, Senin (4/10).

Ia menambahkan, banyak kluster pelayanan yang membutuhkan KTP mulai dari bantuan sosial hingga kepentingan administratif lainnya. Selain itu kartu penduduk tersebut juga membantu penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah seperti pelaksanaan pemilihan umum dan dasar perhitungan DAU, DAK serta dana desa. Adapun

dari temuan kunker Komisi II masih terdapat beberapa permasalahan yang menghinggapi pengadaan e-KTP di Kabupaten Tangerang.

“Seperti ada ribuan yang datanya belum terekam dan e-KTP belum tercetak. Sementara sarana pendukung berupa mesin perekam dan pencetak juga sebagian nesar rusak. Itu karena barangnya memang hibah sejak tahun 2012. Sementara pemda sempat tidak bisa melakukan penghibahan pengadaan mesin terkait e-KTP,” jelas Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI itu.

Mengenai temuan ini, Saan memastikan pihaknya akan menindaklanjuti ke kementerian terkait yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami juga berharap pemda jangan hanya berharap pada hibah pusat saja. Karena sekarang pemda sudah ada kewenangan pengadaan barang perekam dan pencetakannya di daerah, sebab kembali lagi hal ini juga berkaitan dengan kepentingan daerah itu sendiri,” pungkasnya. ■ ah/es

# Komisi III Apresiasi Penanganan Covid-19 oleh Polda DIY

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mewakili Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penanganan pencegahan Covid-19 dan pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga langkah-langkah Polda DIY dalam mengawal program PEN, tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara, penyelewengan dan penyimpangan untuk memaksimalkan kehadiran negara.

“Pak Kapolda sudah memberikan paparan dalam penanganan pencegahan Covid-19 di Yogyakarta, cukup luar biasa dan apresiasi dari Komisi III. Dalam hal ini prosesi dengan target pemulihan ekonomi nasional juga sudah dipaparkan, yang penting jangan lengah,” tutur Sahroni usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar beserta jajaran, di Mapolda DIY, Kamis (30/9).

Politisi Partai NasDem itu juga menekankan kepada Kapolda agar

tetap melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. “Terkait dengan usulan pemerintah untuk membuka pelaksanaan kegiatan di wilayah agar ekonomi berangsur pulih, kita berharap tidak ada lagi gelombang (Corona) ketiga, keempat dan seterusnya. Sekali lagi kepada Kapolda, tetap jangan lengah melakukan hal pengawasan di masyarakat dan prokes tetap dilakukan dengan seksama ke semua pihak,” pesan Sahroni.

Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Idham Samawi juga mengapresiasi para jajaran Polda terkait penanganan Covid-19 dan PEN, serta percepatan vaksinasi di DIY.

“Saya apresiasi ya jajaran Polda, baik penanganan yang berkaitan dengan Covid-19 maupun dengan PEN itu dua-duanya luar biasa keikutsertaannya. Yang saya tahu berkaitan dengan Covid-19 itu bagaimana Polda DIY dalam membantu percepatan vaksinasi. Sehingga dapat menempatkan DIY di papan atas dalam rangka penanganan Covid-19,” ungkap legislator dapil DIY tersebut. ■ ais/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dengan Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar. Foto: Aisyah/nvl

# Komisi III Tekankan Akselerasi PEN dan Vaksinasi di Sumbar



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh berfoto bersama usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat. Foto: Dipa/mvl

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, dan Pejabat Utama Polda Sumbar, di Mapolda Sumbar, Padang, Kamis (30/9).

“Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat. Ada dua hal yang ingin kita dapatkan kejelasan dari Bapak Kapolda. Pertama, terkait dengan pelaksanaan PPKM. Bagaimana pelaksanaan vaksinasinya, bagaimana terkait dengan penyaluran obat-obatan dan lain sebagainya. Kedua, terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumatera Barat, serta aspek anggarannya,” pungkas Pangeran.

Pangeran menegaskan kepada Kapolda Sumbar untuk melakukan akselerasi percepatan kepada seluruh penduduk di Sumbar agar segera

mendapatkan vaksin. Ia ingin upaya-upaya untuk sosialisasi kepada masyarakat kabupaten/kota mendapat dukungan penuh dari gubernur, kepala daerah dan semua pihak.

“Dalam penjelasan Kapolda, bahwa hal-hal yang sangat krusial terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di Sumbar, sebagaimana kita ketahui, jumlah penduduk Sumbar ini 5,5 juta jiwa. Sementara wajib vaksin itu 4,4 juta jiwa. Tetapi hingga semester ini, yang telah mendapat vaksin sekitar 12,4 persen, kurang lebih angkanya di bawah 1 juta orang,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu, Pangeran juga menekankan agar Kapolda beserta jajarannya untuk lebih cepat dalam mendapatkan data dan informasi yang seluas-luasnya, serta masukan terkait PEN di Sumbar, melihat potensi persoalan hukum pada masa pandemi Covid-19 dan isu aktual yang berkembang di masyarakat Sumbar.

“Kita tegaskan terkait adanya penimbunan obat-obatan, kita minta

kepada Kapolda beserta jajarannya untuk menindak tegas. Bagusnya, sejauh ini Polda telah melakukan upaya kolaborasi dan kerja sama dengan dinas-dinas pengguna anggaran, baik dinas provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Pangeran.

Ia berharap agar PEN di Sumbar segera dilakukan percepatan. Ia tidak ingin kebocoran keuangan negara terjadi lagi, serta penyelewengan dan penyimpangan untuk memaksimalkan hadirnya negara. Maka dari itu, Pangeran ingin semua pihak turun langsung membantu masyarakat di masa pandemi ini.

“Kita berharap hal ini terus dilakukan dan dipercepat untuk menjadi bahan dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif. Di luar itu, sekaligus dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan, sehingga proses PEN dapat cepat berjalan di masa pandemi ini,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I itu. ■ dip/sf

# Komisi V Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur Pantai Panjang Bengkulu

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan

pembangunan pengaman Pantai Panjang Bengkulu sepanjang 10 km sangat penting untuk mencegah terjadinya abrasi. Terlebih lagi, Pantai Panjang merupakan salah satu potensi wisata di wilayah Bengkulu.

“Satu hal yang harus dicatat, setelah pembangunan pengaman Pantai Panjang selesai, harus ada sinergi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penataan kawasan,” ucap Arwani saat meninjau kawasan Pantai Panjang Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta jajaran, dan perwakilan Kementerian PUPR, di Kota Bengkulu, Senin (4/10).

Arwani menjelaskan, sangat perlu mengoptimalkan pemanfaatan



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi meninjau kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Foto: Arief/nvl

## Komisi V Dukung Pembangunan Infrastruktur di Sampang

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan, pihaknya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Mengingat kabupaten ini memiliki potensi kawasan industri dan wisata.

Hal ini disampaikan Syarif, saat memimpin Tim Kunspek

Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan infrastruktur ruas Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Senin (4/10). Akses jalan ini berfungsi sebagai sarana dan prasarana penunjang mobilitas masyarakat.

“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi

logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Syarif.

Dikatakannya, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah melakukan beberapa kali realokasi dan *refocusing* anggaran, yang tentu berpengaruh terhadap program pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terhadap kondisi ini, sambung politisi Partai NasDem tersebut, pemerintah diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja, khususnya percepatan

potensi alam, agar perekonomian daerah dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan potensi tersebut salah satu upaya yang harus dilakukan ialah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu perlu didukung penuh, agar dapat lebih berkembang secara ekonomi, terlebih lagi karena adanya dampak pandemi Covid-19. Infrastruktur yang berkualitas akan mendorong mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien, sehingga pendapatan masyarakat akan semakin meningkat,” ucap politisi PPP itu.

Di tempat yang sama, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan infrastruktur ini akan menjadi penguat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu. Sehingga bisa terus berlanjut dan selesai tepat waktu, yaitu di tahun 2022.

Ia juga berharap, pengerjaan proyek di Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan kawasan pulau terluar Indonesia bisa berjalan maksimal pada tahun 2022. “Terkait infrastruktur kita semua mengetahui, karena inilah yang akan menjadi kunci penggerak majunya Provinsi Bengkulu,” pungkas Rohidin kepada Komisi V DPR RI. ■ afr/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie bertukar cenderamata dengan Bupati Sampang Slamet Junaidi. Foto: Dep/nvl

pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Padat Karya. ■ dep/es

## Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Batam-Bintan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad beserta jajaran Pemprov Kepri. Foto: Oji/nvl

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong semua pihak agar mendukung secara maksimal pembangunan jembatan Batam-Bintan agar dapat berjalan dan terselesaikan sesuai dengan perencanaan. Ia menambahkan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau akan mempercepat Bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya. Sehingga berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan usai pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajarannya, para Kepala OPD, para Bupati serta dihadiri pula Mitra kerja Komisi V DPR RI di Batam, Kepri, Senin (4/10).

“Kunjungan Kerja Komisi V DPR kali ini dalam rangka peninjauan sarana

prasarana infrastruktur KemenPUPR di Kepri dan berkaitan dengan usulan rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Bintan,” ungkap Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini mendorong upaya percepatan pembangunan ini secara tegas, sehingga dalam 3-5 tahun yang akan datang jembatan terselesaikan. Ia berharap pembangunan jembatan sudah bisa dimulai pada awal 2022 dengan masa pembiayaan paling lama lima tahun dengan konstruksi yang bisa dilewati.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik dukungan dari Komisi V DPR agar pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa dipercepat. Ia mengatakan jembatan itu sudah direncanakan sejak 2010. Bahkan sudah masuk dalam buku hijau Bappenas. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka rancangan itu sempat tenggelam. ■ oji/es

# Komisi VI Pastikan Ketersediaan Pupuk Nasional di Petrokimia Gresik



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik. Foto: Hanum/nvl

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI hendak memastikan ketersediaan pupuk nasional yang diproduksi PT Petrokimia Gresik.

Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, terungkap adanya *gap* antara alokasi dan kebutuhan real pupuk bersubsidi yang cukup tinggi dalam pengadaan pupuk

untuk masyarakat.

“Hari ini Komisi VI melakukan kunjungan PT Petrokimia Gresik, di mana salah satunya kita ingin memastikan ketersediaan pupuk yang dimiliki oleh PT Petrokimia, khususnya yang dibutuhkan oleh seluruh petani di Indonesia,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9).

“Kita membutuhkan (pupuk) sekitar 24.306.418 juta ton per tahunnya. Akan tetapi nyatanya baru terealisasi sekitar 2 juta. Artinya, ini adalah persoalan besar, yang tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius dari pihak pemerintah yang dalam hal ini mendanai dan membiayai (produksi pupuk),” tegas politisi PKB tersebut.

Karena itu, catatan penting dalam pertemuan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI. “Sehingga apa yang menjadi persoalan hari ini bisa dicarikan solusi terbaik, agar yang dibutuhkan masyarakat bisa terwujud, seperti tingkat kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang lebih baik dan maksimal,” tegasnya. ■ hnm/sf

## Komisi VI Dorong PT Semen Gresik Tingkatkan Pendapatan

**A**nggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan kebutuhan konsumsi semen nasional yang juga berimbas pada penurunan pendapatan di sektor industri semen. Oleh karena itu, ia mendorong agar PT Semen Gresik dapat berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatannya.

“Untuk pasar Jawa-Bali itu sekitar 13 persen berkurangnya, kemudian secara kapasitas nasional berkurang 10 persen,” jelas Intan saat mengikuti

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Semen Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9).

Politisi PAN itu berharap perusahaan pelat merah tersebut dapat meningkatkan *captive market* guna mendapatkan pemasaran yang lebih tepat sasaran. PT Semen Gresik disarankan agar dapat melihat pangsa pasar, khususnya di wilayah Jawa-Bali yang saat ini perekonomiannya mulai kembali membaik.

“Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas produksi dan volume penjualan, kapasitas bahan



Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Ica/mvl

baku-bahan baku semen juga perlu ditingkatkan kapasitas produksinya, karena geliat ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai terlihat, artinya permintaan untuk kebutuhan baku semen juga sudah mulai naik,” ungkap Intan. ■ ica/es

# Pemerintah Harus Bantu Swasta Kembangkan Kawasan Industri

**W**akil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyoroti pihak swasta yang kesulitan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Salah satu kendala dalam pengembangan di Kawasan Industri Sentul adalah persoalan pembebasan lahan. Bambang mendorong pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna percepatan pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta.

“Nah, tentu swasta dalam mengembangkan industri butuh dibantu sarana dan prasarananya. Apa yang paling memberatkan bagi mereka? Nomor satu itu adalah soal lahan. Lahan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto.  
Foto: Tasya/nvl

ini tentu swasta agak susah misalnya untuk pembebasan lahan atau posisi lahan strategi, pemerintah harus bantu,” terang Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo

Cemerlang, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9).

Selain persoalan lahan, ujar Bambang, pihak swasta perlu diberi kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti jalan tol, ketersediaan sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem perizinan terpadu antara pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi juga kabupaten/kota.

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini berharap, pemerintah serius dalam menggarap proyek kawasan industri. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan kontribusi terbesar, yakni 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama tahun 2021. ■ nap/es

## Komisi VII: Indonesia Komitmen Kurangi Emisi Karbon

**A**nggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030. Komitmen tersebut ditunjukkan Indonesia dengan turut menandatangani Paris Agreement yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

“Saya menggarisbawahi, ketika berbicara mengenai emisi karbon, 30 persen (penggunaan karbon) sendiri itu datang dari sektor energi. Maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan,” ujar Dyah Roro

di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/9) malam.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia baru di kisaran 2,5 persen dari total potensi yang dimiliki. “Padahal Indonesia wilayahnya yang sangat luas, dari segi sumber daya yang dimiliki juga melimpah. Seperti energi matahari, angin, air jadi potensinya itu banyak sekali,” tuturnya.

Semua Fraksi di Komisi VII DPR RI, ujar Dyah Roro, memiliki pandangan yang sama terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru



Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Erman/nvl

Terbarukan (RUU EBT). “Kita berharap dengan terciptanya sebuah payung hukum dan kebijakan makro seperti RUU EBT, bisa membantu agar kita bisa merealisasikan potensi yang Indonesia miliki,” pungkasnya. ■ es

# Kasus Covid-19 Menurun, Pembelajaran Tatap Muka Perlahan Dapat Dibuka

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menilai penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia semakin baik, yang ditandai dengan angka kasus positif yang perlahan sudah mulai menurun. Hal itu memungkinkan untuk sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), khususnya di sekolah madrasah, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Dunia pendidikan secara perlahan harus sudah dimulai dengan hadir fisik, proses pendidikan tatap muka harus dilakukan dengan perlahan. Untuk sekolah harus menyediakan fasilitas standart protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pendeteksi suhu tubuh, dan juga ruang isolasi untuk siswa yang sakit,” ucap Ace usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN Bandung Barat Saepuloh, dan perwakilan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, di Sekolah MAN Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (30/9).

Politisi Partai Golkar ini menyebut, dalam program PTM, harus saling bersinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satgas Covid-19, agar bisa mengurangi risiko terpapar virus Covid-19, sehingga madrasah tidak menjadi klaster baru penyebaran Corona. “Kami meminta agar sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua dan satgas Covid-19 dijalankan dengan intens, agar setelah PTM di laksanakan, tidak menjadi klaster Covid-19 baru di dunia pembelajaran,” pesan Ace.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily. Foto: Azka/nvl

Di sisi lain, Ace mengapresiasi fasilitas MAN Bandung Barat, karena sudah cukup mendukung proses pembelajaran, dan didukung lingkungan yang bersih dan asri. Menurutnya, proses pembelajaran

tatap muka sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Legislator dapil Jawa Barat II itu pun berharap ke depan lembaga pendidikan madrasah tidak kalah hebat dengan sekolah-sekolah umum lainnya. ■ azk/sf

## Komisi VIII Akomodir Masukan Para Kyai Soal Revisi UU Pesantren

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Komisi VIII mengakomodir masukan dari para kyai, pengurus, dan pengasuh Pondok Pesantren terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pasalnya menurut masukan yang didapat, terungkap banyak pasal yang tumpang tindih terutama

menyangkut masalah pendanaan penyelenggaraan pesantren.

“Saya mendapatkan masukan dari sejumlah kyai dan Forkopimda yang meminta dan menyampaikan pesan kepada saya agar UU Pesantren ini direvisi. Oleh karena itu Saya berharap Komisi VIII mengakomodir permohonan para kyai ini, karena tanggapan dari kalangan Ponpes setelah membaca

## Komisi VIII Dorong Percepatan Vaksinasi di Lampung

**K**omisi VIII DPR RI mendorong percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung, sehingga *herd immunity* di masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai segera terbentuk. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama di Lampung baru mencapai 21,17 persen, atau sebanyak 1.407.067 orang yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama. Sementara Lampung menargetkan vaksinasi dosis satu sebanyak 6.645.226 orang.

“Kunjungan kami dalam rangka memberikan dukungan dalam percepatan vaksinasi di Lampung. Kita tahu sendiri, Lampung merupakan salah satu daerah yang masih rendah vaksinasinya,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Lampung, di Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/9).

Untuk mendukung percepatan vaksinasi di Lampung, Komang

memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pihak terkait lainnya agar vaksinasi di Lampung terus dapat meningkat. “Kami segera berkoordinasi dengan Menteri terkait dan Presiden langsung agar vaksin di Lampung dapat terus ditingkatkan,”

komitmen politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendesak agar vaksinasi di Lampung dapat terus meningkat, sehingga *herd immunity* bisa tercapai. Hingga saat ini, vaksinasi dosis pertama di Provinsi Lampung telah mencapai 21,17 persen, atau sebanyak 1.407.067 orang yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama.

Di sisi lain, Gubernur Arinal dalam paparannya menyampaikan bahwa Lampung sudah mengalami penurunan kasus penularan Covid-19 sebesar 50 persen selama 1 bulan terakhir, dan kini berada di PPKM Level 1. ■ sf



Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri didampingi Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI bertukar cenderamata dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Rumah Dinas Gubernur Lampung. Foto: Sofyan/rv1



Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Foto: Tiara/Man

dan mempelajari UU ini banyak yang tumpang tindih, terutama menyangkut masalah pendanaan,” jelas Abdul Wachid dalam Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, UU Pesantren bukan hanya semata-mata untuk memperkuat dan meningkatkan pesantren. Dirinya berpendapat selama ini ponpes sudah berkontribusi bagi pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan berhasil menghasilkan para santri hasil didikan secara mandiri kepada negara. Hal ini menunjukkan eksistensi pesantren

dalam berjuang untuk Indonesia. “Jadi saya dorong masukan dari para kyai dan ini harus direvisi,” pungkasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur menuturkan, forum ini menjadi strategis untuk menentukan sikap bersama agar UU Pesantren bisa diterima semua pihak. “UU ini merupakan pemikiran-pemikiran dari manusia. Apa yang menjadi masukan-masukan dari para kyai, kita akan diskusikan kembali, tidak hanya di Jatim tapi nantinya kita akan gali masukan juga ke Ponpes lain, di Jateng, Jabar, agar UU Pesantren ini bisa diterima semua pihak,” tutup Anisah. ■ tra/es

# Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran BSU

**K**etua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian

Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial.

Felly mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati beserta Asosiasi Pekerja Indonesia di Denpasar, Bali, Kamis (30/9). Felly menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi, bahkan sejak penyaluran BSU yang pertama.

“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (Peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka (dapat) tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Felly.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, terkait data hingga proses dikurkannya BSU melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) harus dipermudah, baik secara administrasi maupun tahapan lainnya, agar tidak ada hambatan lagi ke depannya. “Jadi, seperti ini yang kita maksud, agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kemudian juga evaluasi dari yang pemberi data



Foto Bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali. Foto: Nadia/nv

itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang kami minta, karena memang banyak yang complain,” tuturnya.

Felly juga menyoroti data penerima bantuan yang menurutnya tidak sinkron dan terjadi penerimaan yang kerap ganda dari program bantuan lainnya. Sehingga, dirinya meminta perhatian dari seluruh sektor lintas

kementerian lembaga agar dapat mengevaluasi hal tersebut. “Ini (bantuan) yang *double-double*, jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas kelembagaan ya, agar sinkronisasi data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada pemerataan penerima bantuan dari pemerintah,” tandas legislator dari Sulawesi Utara itu. ■ ndy/sf

## Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Adil dalam Penyaluran BSU

**A**nggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah adil dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Ia menyesalkan para pekerja di Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh BSU lantaran perubahan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 atas Permenaker

Nomor 14 Tahun 2020 yang salah satu poinnya menyebutkan, hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 saja yang berhak menerima BSU.

“Peraturan itu sesungguhnya sangat diskriminatif. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga membuat perbedaan untuk wilayah PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada jaminan bahwa di wilayah level 1 dan 2 tidak lebih parah dari level 4 dari

## Komisi IX Evaluasi Penyaluran BSU di Kabupaten Bekasi



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemkab Bekasi. Foto: Opi/nvl

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, di antaranya komunikasi antar bank di kantor pusat

dan kantor cabang yang tidak sinkron, sehingga mengakibatkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan secara cepat. Kedua, terkait terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif.

“Ketiga, gagal salur untuk rekening

eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh Kuasa Pengguna Anggaran,” ucap Charles saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/9).

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, seluruh permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan harus segera ditindaklanjuti serta mendapatkan solusi segera guna memperbaiki kelemahan yang selama ini menjadi permasalahan. “Data dan informasi yang kami dapatkan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini akan menjadi bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan pengawasan penyaluran atau pelaksanaan program BSU,” tandas Charles.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengakui telah mendapatkan banyak masukan dari BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja serta dari instansi atau lembaga lainnya mengenai implementasi BSU. “Disampaikan mereka, terkait BSU cukup lancar, hanya memang ada aspirasi terkait pekerja yang terkena PHK dan akan menjadi bahan rapat kami dengan kementerian, termasuk juga pengawasan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi,” ucap Putih. ■ *opi/sf*

ukuran keuangan,” ujar Ashabul Kahfi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/9).

Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan atas peraturan tersebut dan menyalurkan BSU tidak hanya kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 saja, tetapi kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. “Nah hari ini kan kita tahu bahwa ada sisa Rp1,7 triliun, jadi kita harapkan sisa dana dari Rp1,7 triliun ini untuk menjangkau 6 provinsi tadi yang belum mendapatkan, utamanya Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan bersurat kepada pemerintah pusat

untuk meninjau ulang Permenaker tersebut sehingga para pekerja yang terdampak Covid-19 di Sulteng bisa segera mendapatkan BSU. ■ *eki/es*



Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar. Foto: Eki/nvl

# Penyelenggaraan PON di Papua Bernilai Strategis



Tim Kunspek Komisi X DPR RI menghadiri penyelenggaraan pembukaan PON XX 2020. Foto: Eko/nvl

**K**omisi X DPR RI menghadiri penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua yang sedianya dilaksanakan tahun 2020 yang lalu, tertunda satu tahun akibat

pandemi Covid-19. Pelaksanaan PON XX tahun 2021 ini, menjadi sangat penting. Selain menjaga kelanjutan prestasi atlet nasional maupun atlet daerah, PON Papua juga diharapkan menjadi momentum bagi terjaganya kesehatan

dan kebugaran warga.

Bagi Komisi X DPR RI, kesuksesan PON di Jayapura, Mimika dan Merauke, sangat penting bagi terselenggaranya *sport for all* dan proses pembibitan atlet. PON tahun ini merupakan kejuaraan *multievent* nasional ke-20. Perwakilan Anggota Komisi X yang menghadiri sekaligus mengawasi penyelenggaraan PON di Papua antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifah, Dewi Coryati, dan Illiza Saaduddin Djamal.

Menurut Komisi X DPR RI, penyelenggaraan PON di Papua pada 2-15 Oktober 2021, memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Papua. Dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.

Dari sisi sosial-budaya, akan terjadi interaksi sosial yang masif, di mana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan

## Panja RUU SKN Serap Masukan dari Akademisi UNESA

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, masih ada sejumlah pasal yang dianggap krusial dan belum menemukan formula yang tepat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Di antaranya terkait

keberadaan kelembagaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hal ini disampaikan Fikri usai *Focus Group Discussion* (FGD) Panja RUU SKN Komisi X DPR RI dengan para akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta *stakeholder* lainnya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/10).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai FGD RUU SKN dengan para akademisi UNESA. Foto: Jaka/nvl

masyarakat Papua.

Sebelum pandemi melanda seluruh wilayah di Indonesia, Komisi X DPR RI pernah membentuk Panja Persiapan PON XX di Papua. Panja Persiapan PON Papua menyampaikan 11 rekomendasi terkait beberapa sukses yang harus diraih, terutama sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PON XX juga wajib menargetkan sukses administrasi tanpa meninggalkan masalah hukum, sukses ekonomi bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan momen PON XX sebagai pembangkit peningkatan ekonomi masyarakat, sukses memasyarakatkan olahraga terutama dalam mencegah kembali meluasnya pandemi Covid-19.

Selanjutnya adalah sukses pasca-event, yaitu dengan pengelolaan venue-venue pertandingan pasca penyelenggaraan PON XX 2020, sehingga infrastruktur olahraga yang telah terbangun tidak terbelengkalai dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan olahraga di daerah. Situasi keamanan di Provinsi Papua juga menjadi isu utama menjelang PON XX Papua 2021. Tetapi Komisi X DPR RI percaya, bahwa aparat keamanan, baik Polda Papua maupun Kodam XVII/Cendrawasih mampu menjamin keamanan dan ketertiban. ■ eko/sf

“Kita telah mendapat *reasoning* dari akademisi untuk menggabungkan kedua lembaga tersebut. Karena sampai hari ini penyatuan kedua lembaga tersebut belum menemukan titik temu. Kemudian, ada lembaga *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia yang juga menaungi keolahragaan disabilitas yang perlu diberikan kejelasan juga dalam UU SKN ini,” tandas Fikri.

Fikri menjelaskan, Komisi X telah mengajukan usulan 2 persen dari besaran APBN untuk olahraga, namun, hal ini belum mendapat kesepakatan dengan pihak pemerintah. ■ jk/es

## Komisi X Serap Masukan RUU SKN dari Sivitas Akademika UPI



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UPI. Foto: Tari/nvl

**K**etua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dalam rangka untuk memperkaya masukan dan data lebih banyak dari kalangan akademis bidang olahraga, demi tercapainya penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang lebih komprehensif.

“(Kunjungan ini) untuk minta masukan dari para guru besar di sini, yang kebetulan UPI ini banyak guru besar yang konsennya di bidang olahraga. Banyak hal yang kita dapat dalam rangka revisi substansi Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional kita. Bahkan nanti kita akan minta beliau-beliau untuk bisa mendampingi kita dalam rangka revisi ini sampai nanti menjadi draf final,” kata Huda usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika

UPI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/10).

Huda mengatakan, revisi UU SKN ini juga mencakup tentang kesejahteraan atlet, tenaga pengajar atlet, dan mantan atlet mulai dari pengabdian sampai purna pengabdian. “Dalam draf (RUU SKN) kita sudah pastikan bahwa terkait dengan jaminan kesejahteraan itu mulai dari sejak sebelum dan purna pengabdian itu sudah kita masukan nanti dalam rencana undang-undang revisi ini,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia berharap dengan adanya revisi UU SKN dapat menjangkau kebutuhan para atlet di masa depan. “Kita berharap revisi UU SKN ini bisa menjangkau masa depan kita melampaui *beyond* hari ini dan menjangkau masa depan. Kelihatannya akan bisa karena banyak masukan yang sudah ditampung oleh Komisi X dan nanti tinggal kita rumuskan menjadi bunyi-bunyi dalam pasal-pasal,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII ini. ■ mri/sf

# Komisi XI Ingatkan LMAN Beri Ganti Untung Masyarakat Sekitar Waduk Karian

**A**nggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengingatkan pemerintah, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah dalam Program Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Waduk Karian di Provinsi Banten. Eriko mendorong LMAN memberikan ganti untung kepada masyarakat sekitar pembangunan waduk yang berhak mendapatkan pemanfaatan program.

Demikian ditegaskan Eriko saat diwawancarai *Parlementaria* usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Direktur Utama LMAN Basuki Purwad dan Kepala Kanwil DJKN Banten Rahmat Subagio beserta jajaran, di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/10).

“Persoalan ini merupakan permasalahan klasik yang artinya di setiap wilayah yang dibangun proyek strategis nasional itu terdapat banyak kendala terutama pada persoalan tanah. Berdasar pertemuan ini, hasil evaluasi kami mendapati banyak temuan seperti masyarakat sekitar pembangunan Waduk Karian yang berhak mendapatkan ganti untung ternyata sampai belum mendapatkan,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Eriko melanjutkan, di sisi lain Komisi XI DPR RI juga mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)

sudah efektif dan tepat guna kepada masyarakat luas. Mengingat, Komisi XI DPR RI bersama Banggar DPR RI yang memberikan persetujuan untuk PMN tersebut terhadap LMAN dan Kemenkeu. ■ pun/sf

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga.  
Foto: Puntho/nvi



## DAK Dinilai Banyak Masalah



Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.  
Foto: Taufan/nvi

**A**nggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta agar BPK bersinergi dan melakukan kerja sama dengan DPR RI dalam mengidentifikasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ditemukan banyak sekali seperti penerima hibah yang belum melapor, masih ada kabupaten/kota yang pengadaan barangnya tidak sesuai

aturan. Seperti yang kita tahu, fungsi anggaran itu kan ada di DPR, kemudian fungsi pengawasan juga ada di DPR, baru kemudian fungsi audit ada di BPK. Sudah jelas BPK bertanggung jawab kepada DPR,” sebut Agun saat mengikuti Kunspek Komisi XI DPR RI ke BPK Perwakilan Jawa Barat, di Bandung, Jumat (1/10).

Pengalokasian DAK dinilai tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu penganggaran DAK fisik juga berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas, serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan, karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

“Jadi harus ada sebuah mekanisme yang lebih bagus, bagaimana fungsi pengawasan Parlemen dengan fungsi audit BPK bersinergi sehingga wakil rakyat itu bisa mengecek transfer ke daerah itu hingga ke kabupaten/kota,” tegas politisi Partai Golkar itu. ■ tn/sf



# EBT Harus Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat

**W**akil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka akselerasi transisi sistem energi nasional yang berkelanjutan.

Ibnu mengatakan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Bali, Senin (4/10), dalam rangka Penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2022 dan menyerap aspirasi masyarakat terkait harmonisasi RUU

tentang Energi Baru dan Terbarukan yang akan menjadi RUU usul DPR RI. “Sumber Energi Baru dan Terbarukan tersedia melimpah di Indonesia dan belum dikelola dan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Hira/nvl

dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap Persetujuan Paris yang telah disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

“Peningkatan pemanfaatan sumber Energi Baru dan Terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VII tersebut. ■ hal/sf

## Jangan Ada Tumpang Tindih Kewenangan Dalam RUU EBT

**A**nggota Badan Legislasi DPR RI Riezky Aprilia memahami keinginan pemerintah daerah agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sedang dalam proses harmonisasi di Baleg.

“Kita memahami, nanti Pemkab, Pemprov hingga pemerintah pusat harapannya bisa meng-clear-kan status masing-masing supaya jangan sampai tumpang tindih kewenangan,” ungkap Riezky usai pertemuan Tim

Kunker Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Kamis (30/9).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan *resourcing* (sumber daya) EBT ini akan berimplikasi pada masyarakat. Hadirnya RUU EBT diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana PLN juga menegaskan listrik dibutuhkan untuk energi masa depan dengan sumber EBT.

“Landasan berpijak UUD 1945 dan UU Agraria terkait penguasaan lahan dan tanah jangan dilepaskan dari RUU EBT. Bahwa di sini negara punya peran



Foto bersama Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Foto: Oji/nvl

melindungi hak warga negaranya bukan semata bicara bisnis kepada masyarakat,” tukasnya. Lebih lanjut Riezky menilai kebutuhan EBT harus dikalkulasikan secara tepat dan benar apakah mampu menopang kebutuhan energi untuk jangka panjang. ■ oji/sf

# DPR Sukses Galang Dukungan Parlemen Dunia Percepat Capaian SDGs

**D**PR RI sukses menggalang dukungan global untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Melalui forum *First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs* yang diselenggarakan atas kerjasama DPR RI dengan *Inter-Parliamentary Union (IPU)* berhasil menghasilkan suatu *outcome document* sebagai kesepakatan bersama antar lembaga parlemen sedunia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus mengajak seluruh anggota parlemen global untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali komitmen dan upaya pencapaian SDGs. Sihar mengingatkan, target SDGs tidak akan tercapai bila keterlibatan parlemen masih lemah, sehingga parlemen harus meningkatkan komitmen terhadap SDGs melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tidak hanya aspek ekonomi.

“Parlemen harus menyusun kebijakan yang menyertakan kebutuhan dari seluruh tingkatan masyarakat terutama kaum yang termarginalkan dan kelompok rentan,” ujar Sihar saat bertindak sebagai *rappporteur* dalam *The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs* yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Kamis (30/9), yang diselenggarakan oleh DPR RI dan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Puntho/mv

Inter-Parliamentary Union (IPU) secara kehadiran fisik dan virtual.

Ketua Gugus Tugas SDGs DPR RI ini menyatakan disparitas dan berbagai bentuk diskriminasi dapat menghambat pemerataan pembangunan dan mempengaruhi pemulihan dunia pasca pandemi. Karena itu, sambung Sihar,

”

**MENJADIKAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MENUMBUHKAN KEMBALI KOMITMEN DAN UPAYA PENCAPAIAN SDGs**

parlemen harus menyusun kebijakan yang mendukung implementasi SDGs. Sihar juga menggarisbawahi pentingnya *political will* terutama dari anggota parlemen untuk mencapai SDGs karena parlemen bukan merupakan suatu prosedur melainkan representasi dari kehendak rakyat.

“Implementasi SDGs berkaitan dengan kemauan politik. Kerja sama global merupakan hal yang sangat penting yang ditopang oleh upaya-upaya parlemen melalui perumusan kebijakan, pengalokasian anggaran serta pengawasan. SDGs merupakan aspirasi global yang paling komprehensif dan integratif. Parlemen lebih dari sekedar sebuah prosedur tapi merupakan kehendak rakyat,” pungkas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menutup pernyataannya. ■ rnm/sf



Foto bersama Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Foto: Andri/nvl

# BURT DPR Dorong Joumpa Tingkatkan Jasa Layanan

**P**enurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah berdampak pada peningkatan transportasi, terutama sektor penerbangan. Mengingat syarat penerbangan adalah vaksin dan *swab* antigen untuk penerbangan di Jawa Bali, maka implementasi kebijakan baru tersebut ikut mengubah pola interaksi di bandara, termasuk kepada Anggota DPR RI. Sehingga perlu penataan pola interaksi baru di bandara.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti pun memimpin Tim Kunker BURT DPR RI ke Bandara I Gusti Ngurah Rai

di Denpasar, Bali, Senin (4/10) dalam rangka pengawasan terhadap Layanan Joumpa Airport VIP Service and Lounge dan meninjau pelaksanaan penataan pola interaksi baru pasca-PPKM darurat yang mencakup tentang kesiapan sarana, prasarana, SDM, dan prosedur keberangkatan termasuk fasilitas kesehatan (*faskes*) serta layanan *lounge* sesuai protokol kesehatan.

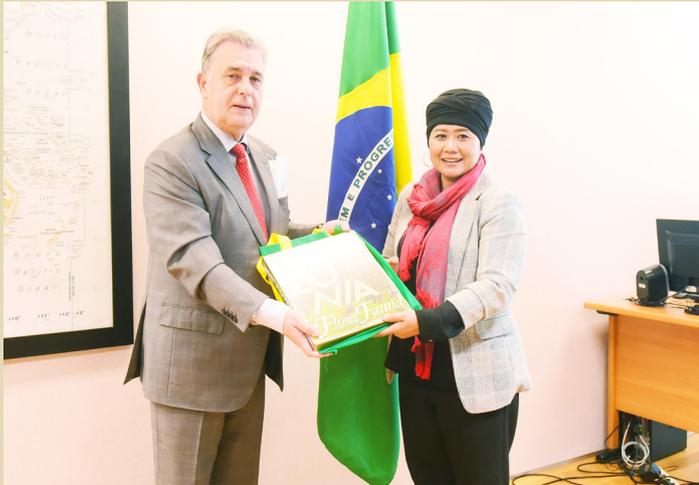
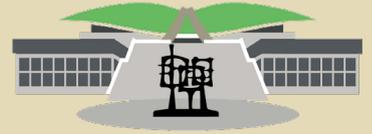
Novita mendorong staf layanan bandara, terutama Joumpa Airport VIP Service untuk selalu profesional dalam memberikan jasa layanan bandara. "Sering terjadi ketika Joumpa sedang membawa VIP atau Anggota DPR sering ditanya terlebih dahulu oleh pihak

Angkasa Pura, baru bisa melewati jalur khusus. Di sini berarti Gapura Angkasa kurang sinergi dengan Angkasa Pura," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut dalam pertemuan itu.

Untuk memaksimalkan pelayanan, Novita berharap Gapura Angkasa meningkatkan sinergi dengan Angkasa Pura serta maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan VIP melalui Joumpa Airport VIP Service and Lounge. Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, penerapan '*new normal*' ini pada dasarnya untuk mengatur ketentuan pelaksanaan proses di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Setelah melihat langsung fasilitasnya dan mendengar penjelasan pejabat terkait, Novita menilai layanan Joumpa Airport VIP Service and Lounge di Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan cukup baik. Namun, sinergi antar *stakeholder* perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

"Joumpa memberikan pelayanan sudah baik, namun Gapura Angkasa perlu menjalin kordinasi yang lebih baik dengan Angkasa Pura dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan jasa Joumpa," pinta legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII tersebut. ■ *man/sf*



Ketua GKSBB Parlemen Indonesia - Brazil Luluk Nur Hamidah saat menggelar *courtesy call* dengan Duta Besar Republik Federasi Brazil di Kedutaan Besar Republik Federasi Brazil, Jakarta, Selasa (5/10). Foto: Jaka/nvl



Anggota Komisi II DPR RI Rifqinuzami Karsayuda saat (kiri) saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/10). Foto: Ist/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bersama Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul saat menjadi pembicara dalam FDG Puspanlak UU terkait peningkatan kolaborasi antara PPUU dengan TA AKD, di Jakarta, Jumat (1/10). Foto: Bianca/nvl